

BAB II

2.1 Gambaran Umum Kota Medan

2.1.1 Sejarah Kota Medan⁴⁰

Medan Tanah Deli

Pada zaman dahulu Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang Saling/Sei Kera. Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan–Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang populer.

Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang) sampai ke Sungai Wampu di Langkat sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantara kedua sungai tersebut. Secara keseluruhan jenis tanah di wilayah Deli terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran, tanah hitam, tanah coklat dan tanah merah. Hal ini merupakan penelitian dari Van Hissink tahun 1900 yang dilanjutkan oleh penelitian Vriens tahun 1910 bahwa disamping jenis tanah

⁴⁰Sejarah Kota Medan diolah dalam Buku BPS Kota Medan tahun 2016 dalam bentuk PDF.

seperti tadi ada lagi ditemui jenis tanah liat yang spesifik. Tanah liat inilah pada waktu penjajahan Belanda ditempat yang bernama Bakaran Batu (sekarang Medan Tenggara atau Menteng) orang membakar batu bata yang berkualitas tinggi dan salah satu pabrik batu bata pada zaman itu adalah Deli Klei. Mengenai curah hujan di Tanah Deli digolongkan dua macam yakni : Maksima Utama dan Maksima Tambahan. Maksima Utama terjadi pada bulan-bulan Oktober s/d bulan Desember sedang Maksima Tambahan antara bulan Januari s/d September. Secara rinci curah hujan di Medan rata-rata 2000 pertahun dengan intensitas rata-rata 4,4 mm/jam.

Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan disana sini terutama dimuara-muara sungai diselingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi Kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara.

Kampung Medan dan Tembakau Deli

Pada awal perkembangannya merupakan sebuah kampung kecil bernama "Medan Putri". Perkembangan Kampung "Medan Putri" tidak terlepas dari posisinya yang strategis karena terletak di pertemuan sungai Deli dan sungai Babura, tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang. Kedua sungai tersebut pada zaman dahulu merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai,

sehingga dengan demikian Kampung "Medan Putri" yang merupakan cikal bakal Kota Medan, cepat berkembang menjadi pelabuhan transit yang sangat penting. Semakin lama semakin banyak orang berdatangan ke kampung ini dan isteri Guru Patimpus yang mendirikan kampung Medan melahirkan anaknya yang pertama seorang laki-laki dan dinamai si Kolok.

Mata pencarian orang di Kampung Medan yang mereka namai dengan si Sepuluh dua Kuta adalah bertani menanam lada. Tidak lama kemudian lahirlah anak kedua Guru Patimpus dan anak inipun laki-laki dinamai si Kecik. Pada zamannya Guru Patimpus merupakan tergolong orang yang berfikiran maju. Hal ini terbukti dengan menyuruh anaknya berguru (menuntut ilmu) membaca Alqur'an kepada Datuk Kota Bangun dan kemudian memperdalam tentang agama Islam ke Aceh. Keterangan yang menguatkan bahwa adanya Kampung Medan ini adalah keterangan H. Muhammad Said yang mengutip melalui buku *Deli In Woord en Beeld* ditulis oleh N.Ten Cate. Keterangan tersebut mengatakan bahwa dahulu kala Kampung Medan ini merupakan Benteng dan sisanya masih ada terdiri dari dinding dua lapis berbentuk bundaran yang terdapat dipertemuan antara dua sungai yakni Sungai Deli dan sungai Babura. Rumah Administrateur terletak diseberang sungai dari kampung Medan. Kalau kita lihat bahwa letak dari Kampung Medan ini adalah di Wisma Benteng sekarang dan rumah Administrateur tersebut adalah kantor PTP IX Tembakau Deli yang sekarang ini. Sekitar tahun 1612 setelah dua dasa warsa berdiri Kampung Medan, Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di Aceh mengirim

Panglimanya bernama Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintang untuk menjadi pemimpin yang mewakili kerajaan Aceh di Tanah Deli.

Gocah Pahlawan membuka negeri baru di Sungai Lalang, Percut. Selaku Wali dan Wakil Sultan Aceh serta dengan memanfaatkan kebesaran imperium Aceh, Gocah Pahlawan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga meliputi Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Medan Deli sekarang. Dia juga mendirikan kampung-kampung Gunung Klarus, Sampali, Kota Bangun, Pulau Brayan, Kota Jawa, Kota Rengas Percut dan Sigara-gara. Dengan tampilnya Gocah pahlawan mulailah berkembang Kerajaan Deli dan tahun 1632 Gocah Pahlawan kawin dengan putri Datuk Sunggal. Setelah terjadi perkawinan ini raja-raja di Kampung Medan menyerah pada Gocah Pahlawan.

Gocah Pahlawan wafat pada tahun 1653 dan digantikan oleh puteranya Tuangku Panglima Perunggit, yang kemudian memproklamkan kemerdekaan Kesultanan Deli dari Kesultanan Aceh pada tahun 1669, dengan ibukotanya di Labuhan, kira-kira 20 km dari Medan. Jhon Anderson seorang Inggris melakukan kunjungan ke Kampung Medan tahun 1823 dan mencatat dalam bukunya *Mission to the East Coast of Sumatera* bahwa penduduk Kampung Medan pada waktu itu masih berjumlah 200 orang tapi dia hanya melihat penduduk yang berdiam dipertemuan antara dua sungai tersebut. Anderson menyebutkan dalam bukunya "*Mission to the East Coast of Sumatera*" (terbitan Edinburg 1826) bahwa sepanjang sungai Deli hingga ke dinding tembok mesjid Kampung Medan di bangun dengan batu-batu granit berbentuk bujur sangkar. Batu-batu ini

diambil dari sebuah Candi Hindu Kuno di Jawa. Pesatnya perkembangan Kampung "Medan Putri", juga tidak terlepas dari perkebunan tembakau yang sangat terkenal dengan tembakau Delinya, yang merupakan tembakau terbaik untuk pembungkus cerutu. Pada tahun 1863, Sultan Deli memberikan kepada Nienhuys Van der Falk dan Elliot dari Firma Van Keeuwen en Mainz & Co, tanah seluas 4.000 bahu (1 bahu = 0,74 ha) secara erfpacht 20 tahun di Tanjung Sepassi, dekat Labuhan. Contoh tembakau deli. Maret 1864, contoh hasil panen dikirim ke Rotterdam di Belanda, untuk diuji kualitasnya. Ternyata daun tembakau tersebut sangat baik dan berkualitas tinggi untuk pembungkus cerutu.

Kemudian di tahun 1866, Janssen, P.W. Clemen, Cremer dan Nienhuys mendirikan de Deli Maatscapij di Labuhan. Kemudian melakukan ekspansi perkebunan baru di daerah Martubung, Sunggal (1869), Sungai Beras dan Klumpang (1875), sehingga jumlahnya mencapai 22 perusahaan perkebunan pada tahun 1874. Mengingat kegiatan perdagangan tembakau yang sudah sangat luas dan berkembang, Nienhuys memindahkan kantor perusahaannya dari Labuhan ke Kampung "Medan Putri". Dengan demikian "Kampung Medan Putri" menjadi semakin ramai dan selanjutnya berkembang dengan nama yang lebih dikenal sebagai "Kota Medan".

Legenda Kota Medan

Menurut legenda di zaman dahulu kala pernah hidup di Kesultanan Deli lama kira-kira 10 Km dari Kampung Medan yakni di Deli Tua sekarang seorang Putri yang sangat cantik dan karena kecantikannya diberi nama Putri Hijau.

Kecantikan Putri ini tersohor kemana-mana mulai dari Aceh sampai ke ujung Utara Pulau Jawa. Sultan Aceh jatuh cinta pada Putri itu dan melamarnya untuk dijadikan permaisurinya. Lamaran Sultan Aceh itu ditolak oleh saudara kedua laki-laki Putri Hijau. Sultan Aceh sangat marah karena penolakan itu dianggapnya sebagai penghinaan terhadap dirinya. Maka pecahlah perang antara Kesultanan Aceh dengan Kesultanan Deli.

Menurut legenda yang tersebut diatas, dengan menggunakan kekuatan gaib seorang dari saudara Putri hijau menjelma menjadi seekor ular naga dan seorang lagi menjadi sepucuk meriam yang tidak henti-hentinya menembaki tentara Aceh hingga akhir hayatnya. Kesultanan Deli lama mengalami kekalahan dalam peperangan itu dan karena kecewa Putra Mahkota yang menjelma menjadi meriam itu meledak sebagian, bagian belakangnya terlontar ke Labuhan Deli dan bagian depannya kedataran tinggi Karo kira-kira 5 Km dari Kabanjahe. Putri Hijau ditawan dan dimasukkan dalam sebuah peti kaca yang dimuat kedalam kapal untuk seterusnya dibawa ke Aceh. Ketika kapal sampai di Ujung Jambo Aye, Putri Hijau mohon diadakan satu upacara untuknya sebelum peti diturunkan dari kapal. Atas permintaannya, harus diserahkan padanya sejumlah beras dan beribu-ribu telur dan permohonan tuan Putri dikabulkan. Tetapi baru saja upacara dimulai tiba-tiba berhembuslah angin ribut yang maha dahsyat disusul gelombang-gelombang yang sangat tinggi.

Dari dalam laut muncullah abangnya yang telah menjelma menjadi ular naga itu dan dengan menggunakan rahangnya yang besar itu diambilnya peti

tempat adiknya dikurung, lalu dibawanya masuk ke dalam laut. Legenda ini samapai sekarang masih terkenal di kalangan masyarakat Deli dan malahan juga dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Di Deli Tua masih terdapat reruntuhan Benteng dan Puri yang berasal dari zaman Putri Hijau, sedang sisa meriam penjelmaan abang Putri Hijau itu dapat dilihat di halaman Istana Maimun Medan.

Penjajahan Belanda di Tanah Deli

Belanda yang menjajah Nusantara kurang lebih setengah abad namun untuk menguasai Tanah Deli mereka sangat banyak mengalami tantangan yang tidak sedikit. Mereka mengalami perang di Jawa dengan pangeran Diponegoro sekitar tahun 1825-1830. Belanda sangat banyak mengalami kerugian sedangkan untuk menguasai Sumatera, Belanda juga berperang melawan Aceh, Minangkabau, dan Sisingamangaraja di daerah Tapanuli. Jadi untuk menguasai Tanah Deli Belanda hanya kurang lebih 78 tahun mulai dari tahun 1864 sampai 1942. Setelah perang Jawa berakhir barulah Gubernur Jenderal Belanda J. Van den Bosch mengerahkan pasukannya ke Sumatera dan dia memperkirakan untuk menguasai Sumatera secara keseluruhan diperlukan waktu 25 tahun.

Penaklukan Belanda atas Sumatera ini terhenti ditengah jalan karena Menteri Jajahan Belanda waktu itu J.C. Baud menyuruh mundur pasukan Belanda di Sumatera walaupun mereka telah mengalahkan Minangkabau yang dikenal dengan nama perang Paderi (1821-1837). Sultan Ismail yang berkuasa di Riau secara tiba-tiba diserang oleh gerombolan Inggeris dengan pimpinannya bernama Adam Wilson. Berhubung pada waktu itu kekuatannya terbatas maka Sultan

Ismail meminta perlindungan pada Belanda. Sejak saat itu terbukalah kesempatan bagi Belanda untuk menguasai Kerajaan Siak Sri Indrapura yang rajanya adalah Sultan Ismail. Pada tanggal 1 Februari 1858 Belanda mendesak Sultan Ismail untuk menandatangani perjanjian agar daerah taklukan kerajaan Siak Sri Indrapura termasuk Deli, Langkat dan Serdang di Sumatera Timur masuk kekuasaan Belanda. Karena daerah Deli telah masuk kekuasaan Belanda otomatislah Kampung Medan menjadi jajahan Belanda, tapi kehadiran Belanda belum secara fisik menguasai Tanah Deli.

Pada tahun 1858 juga Elisa Netscher diangkat menjadi Residen Wilayah Riau dan sejak itu pula dia mengangkat dirinya menjadi pembela Sultan Ismail yang berkuasa di kerajaan Siak. Tujuan Netscher itu adalah dengan duduknya dia sebagai pembela Sultan Ismail secara politis tentunya akan mudah bagi Netscher menguasai daerah taklukan kerajaan Siak yakni Deli yang di dalamnya termasuk Kampung Medan Putri. Perkembangan Medan Putri menjadi pusat perdagangan telah mendorongnya menjadi pusat pemerintahan. Tahun 1879, Ibukota Asisten Residen Deli dipindahkan dari Labuhan ke Medan, 1 Maret 1887, Ibukota Residen Sumatera Timur dipindahkan pula dari Bengkalis ke Medan, Istana Kesultanan Deli yang semula berada di Kampung Bahari (Labuhan) juga pindah dengan selesainya pembangunan Istana Maimoon pada tanggal 18 Mei 1891, dan dengan demikian Ibukota Deli telah resmi pindah ke Medan.

Pada tahun 1915 Residensi Sumatera Timur ditingkatkan kedudukannya menjadi Gubernemen. Pada tahun 1918 Kota Medan resmi menjadi Gemeente

(Kota Praja) dengan Walikota Baron Daniel Mac Kay. Berdasarkan "Acte van Schenking" (Akte Hibah) Nomor 97 Notaris J.M. de-Hondt Junior, tanggal 30 Nopember 1918, Sultan Deli menyerahkan tanah kota Medan kepada Gemeente Medan, sehingga resmi menjadi wilayah di bawah kekuasaan langsung Hindia Belanda. Pada masa awal Kotapraja ini, Medan masih terdiri dari 4 kampung, yaitu Kampung Kesawan, Kampung Sungai Rengas, Kampung Petisah Hulu dan Kampung Petisah Hilir.

Pada tahun 1918 penduduk Medan tercatat sebanyak 43.826 jiwa yang terdiri dari Eropa 409 orang, Indonesia 35.009 orang, Cina 8.269 orang dan Timur Asing lainnya 139 orang. Sejak itu Kota Medan berkembang semakin pesat. Berbagai fasilitas dibangun. Beberapa diantaranya adalah Kantor Stasiun Percobaan AVROS di Kampung Baru (1919), sekarang RISPA, hubungan Kereta Api Pangkalan Brandan - Besitang (1919), Konsulat Amerika (1919), Sekolah Guru Indonesia di Jl. H.M. Yamin sekarang (1923), Mingguan Soematra (1924), Perkumpulan Renang Medan (1924), Pusat Pasar, R.S. Elizabeth, Klinik Sakit Mata dan Lapangan Olah Raga Kebun Bunga (1929).

Secara historis perkembangan Kota Medan, sejak awal telah memosisikan menjadi pusat perdagangan (ekspor-impor) sejak masa lalu. sedang dijadikannya medan sebagai ibukota deli juga telah menjadikannya Kota Medan berkembang menjadi pusat pemerintah. sampai saat ini disamping merupakan salah satu daerah kota, juga sekaligus sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara.

Kota Medan Masa Penjajahan Jepang

Tahun 1942 penjajahan Belanda berakhir di Sumatera yang ketika itu Jepang mendarat di beberapa wilayah seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan khusus di Sumatera Jepang mendarat di Sumatera Timur. Tentara Jepang yang mendarat di Sumatera adalah tentara XXV yang berpangkalan di Shonanto yang lebih dikenal dengan nama Singapore, tepatnya mereka mendarat tanggal 11 malam 12 Maret 1942. Pasukan ini terdiri dari Divisi Garda Kemaharajaan ke-2 ditambah dengan Divisi ke-18 dipimpin langsung oleh Letjend. Nishimura. Ada empat tempat pendaratan mereka ini yakni Sabang, Ulele, Kuala Bugak (dekat Peurlak Aceh Timur sekarang) dan Tanjung Tiram (kawasan Batubara sekarang).

Pasukan tentara Jepang yang mendarat di kawasan Tanjung Tiram inilah yang masuk ke Kota Medan, mereka menaiki sepeda yang mereka beli dari rakyat disekitarnya secara barter. Mereka bersemboyan bahwa mereka membantu orang Asia karena mereka adalah saudara Tua orang-orang Asia sehingga mereka dieluelukan menyambut kedatangannya. Ketika peralihan kekuasaan Belanda kepada Jepang Kota Medan kacau balau, orang pribumi mempergunakan kesempatan ini membalas dendam terhadap orang Belanda. Keadaan ini segera ditertibkan oleh tentara Jepang dengan mengerahkan pasukannya yang bernama “Kempetai” (Polisi Militer Jepang). Dengan masuknya Jepang di Kota Medan keadaan segera berubah terutama pemerintahan sipilnya yang zaman Belanda disebut “Gemeente Bestuur” oleh Jepang dirobah menjadi “Medan Sico”

(Pemerintahan Kotapraja). Yang menjabat pemerintahan sipil di tingkat Kotapraja Kota Medan ketika itu hingga berakhirnya kekuasaan Jepang bernama Hoyasakhi. Untuk tingkat keresidenan di Sumatera Timur karena masyarakatnya heterogen disebut Syucokan yang ketika itu dijabat oleh T.Nakashima, pembantu Residen disebut dengan Gunseibu.

Penguasaan Jepang semakin merajalela di Kota Medan mereka membuat masyarakat semakin papa, karena dengan kondisi demikianlah menurut mereka semakin mudah menguasai seluruh Nusantara, semboyan saudara Tua hanyalah semboyan saja. Disebelah Timur Kota Medan yakni Marindal sekarang dibangun Kengrohositai sejenis pertanian kolektif. Dikawasan Titi Kuning Medan Johor sekarang tidak jauh dari lapangan terbang Polonia sekarang mereka membangun landasan pesawat tempur Jepang.

Kota Medan Menyambut Kemerdekaan Republik Indonesia

Dimana-mana diseluruh Indonesia menjelang tahun 1945 bergema persiapan Proklamasi demikian juga di Kota Medan tidak ketinggalan para tokoh pemudanya melakukan berbagai macam persiapan. Mereka mendengar bahwa bom atom telah jatuh melanda Kota Hiroshima, berarti kekuatan Jepang sudah lumpuh. Sedangkan tentara sekutu berhasrat kembali untuk menduduki Indonesia. Khususnya di kawasan kota Medan dan sekitarnya, ketika penguasa Jepang menyadari kekalahannya segera menghentikan segala kegiatannya, terutama yang berhubungan dengan pembinaan dan pengerahan pemuda. Apa yang selama ini mereka lakukan untuk merekrut massa pemuda seperti Heiho,

Romusha, Gyu Gun dan Talapeta mereka bubarkan atau kembali kepada masyarakat. Secara resmi kegiatan ini dibubarkan pada tanggal 20 Agustus 1945 karena pada hari itu pula penguasa Jepang di Sumatera Timur yang disebut Tetsuzo Nakashima mengumumkan kekalahan Jepang. Beliau juga menyampaikan bahwa tugas pasukan mereka dibekas pendudukan untuk menjaga status quo sebelum diserahkan pada pasukan sekutu.

Sebagian besar anggota pasukan bekas Heiho, Romusha, Talapeta dan latihan Gyu Gun merasa bingung karena kehidupan mereka terhimpit dimana mereka hanya diberikan uang saku yang terbatas, sehingga mereka kelihatan berlalu lalang dengan seragam coklat di tengah kota. Beberapa tokoh pemuda melihat hal demikian mengambil inisiatif untuk menanggulangnya. Terutama bekas perwira Gyu Gun diantaranya Letnan Achmad Tahir mendirikan suatu kepanitiaan untuk menanggulangi para bekas Heiho, Romusha yang famili/saudaranya tidak ada di kota Medan. Panitia ini dinamai dengan "Panitia Penolong Pengangguran Eks Gyu Gun" yang berkantor di Jl. Istana No.17 (Gedung Pemuda sekarang).

Tanggal 17 Agustus 1945 gema kemerdekaan telah sampai ke kota Medan walupun dengan agak tersendat-sendat karena keadaan komunikasi pada waktu itu sangat sederhana sekali. Kantor Berita Jepang "Domei" sudah ada perwakilannya di Medan namun mereka tidak mau menyiarkan berita kemerdekaan tersebut, akibatnya masyarakat tambah bingung. Sekelompok kecil tentara sekutu tepatnya tanggal 1 September 1945 yang dipimpin Letnan I Pelaut

Brondgeest tiba di kota Medan dan berkantor di Hotel De Boer (sekarang Hotel Dharma Deli). Tugasnya adalah mempersiapkan pengambilalihan kekuasaan dari Jepang. Pada ketika itu pula tentara Belanda yang dipimpin oleh Westerling didampingi perwira penghubung sekutu bernama Mayor Yacobs dan Letnan Brondgeest berhasil membentuk kepolisian Belanda untuk kawasan Sumatera Timur yang anggotanya diambil dari eks KNIL dan Polisi Jepang yang pro Belanda. Akhirnya dengan perjalanan yang berliku-liku para pemuda mengadakan berbagai aksi agar bagaimanapun kemerdekaan harus ditegakkan di Indonesia demikian juga di kota Medan yang menjadi bagiannya. Mereka itu adalah Achmad Tahir, Amir Bachrum Nasution, Edisaputra, Rustam Efendy, Gazali Ibrahim, Roos Lila, A.malik Munir, Bahrum Djamil, Marzuki Lubis dan Muhammad Kasim Jusni.

2.1.2 Letak Geografis

Medan berasal dari kata Tamil Maidhan atau Maidhanam, yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas, teradopsi ke Bahasa Melayu. Kota Medan merupakan ibu kota propinsi Sumatera Utara. Kota Medan adalah kota terbesar nomor tiga setelah Kota Jakarta dan Kota Surabaya. Kota Medan merupakan kota yang letaknya sangat strategis karena merupakan pintu gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri (ekspor-impor). Kota Medan juga dilalui oleh dua sungai yaitu Sungai Deli dan Babura yang bermuara di selat malaka.

Secara geografis, Kota Medan diperkirakan terletak diantara $2^{\circ}.27'$ - $2^{\circ}.47'$ LU dan $98^{\circ}.44'$ BT. Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar atau 265,10 Km². Sama luasnya dengan 3,6 % dari total luas Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif Kota Medan berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Malaka

Sebelah Timur : Berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang

Kota Medan terdiri dari 21 Kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Belawan, dan Kecamatan Medan Kompas dan terdiri dari 151 Kelurahan.

Tabel 2.1**Luas Wilayah Kota Medan berdasarkan 21 Kecamatan⁴¹**

No	Nama Kecamatan	Luas Area (Km²)	Persentase
1	Medan Tuntungan	20,68	7,80
2	Medan Johor	14,58	5,50
3	Medan Amplas	11,19	4,22
4	Medan Denai	9,05	3,41
5	Medan Area	5,52	2,08
6	Medan Kota	5,27	1,99
7	Medan Maimun	2,98	1,12
8	Medan Polonia	9,01	3,40
9	Medan Baru	5,84	2,20
10	Medan Selayang	12,81	4,83
11	Medan Sunggal	15,44	5,82
12	Medan Helvetia	13,16	4,96
13	Medan Petisah	6,82	2,57
14	Medan Barat	5,33	2,01
15	Medan Timur	7,76	2,93
16	Medan Perjuangan	4,09	1,54

⁴¹Sumber :Bagian Tata Pemerintah diolah dalam buku BPS Kota Medan.hal 72

17	Medan Tembung	7,99	3,01
18	Medan Deli	20,84	7,86
19	Medan Labuhan	36,67	13,83
20	Medan Marelan	23,82	8,99
21	Medan Belawan	26,25	9,90
	Kota Medan	265,10	100,00

2.1 Gambar Peta Kota Medan



2.1.3 Demografi Penduduk

Penduduk Kota Medan memiliki ciri penting yang meliputi unsur agama, budaya, suku etnis dan keberagaman adat istiadat. Hal ini memunculkan karakter sebagian masyarakat Kota Medan bersifat terbuka. Secara Demografi, Kota

Medan saat ini mengalami masa transisi. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran dimana tingkat kelahiran dan kematian tinggi menuju keadaan tingkat kelahiran dan kematian tinggi menurun. Berbagai faktor yang mendorong hal ini terjadi adalah perubahan pola pikir masyarakat dan perubahan sosial ekonominya. Di sisi lain adanya faktor perbaikan gizi, kesehatan yang memadai tingkat kematian masyarakat.

Mayoritas Penduduk kota Medan saat ini adalah Suku Jawa dan Batak Toba. Dan untuk etnis asli kota Medan adalah Suku Melayu dan Suku Karo. Di Medan banyak pula orang keturunan India dan Tionghoa. Medan salah satu kota di Indonesia yang memiliki populasi orang Tionghoa cukup banyak. Keanekaragaman ini dapat terlihat dari jumlah masjid, gereja dan vihara Tionghoa yang tersebar di seluruh kota Medan. Total populasi penduduk Kota Medan adalah 2.210.624 jiwa, yaitu populasi laki-laki sebanyak 1.091.937 jiwa dan perempuan sebanyak 1.118.687 jiwa (BPS, 2015). Berdasarkan tabel diatas juga dapat kita tarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebanyak 26.750 jiwa.

Tabel 2.2**Data Penduduk Kota Medan berdasarkan 21 Kecamatan⁴²**

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Medan Tuntungan	42.288	43.325	85.613
2	Medan Johor	65.207	66.805	132.012
3	Medan Amplas	61.176	62.674	123.850
4	Medan Denai	72.147	73.914	146.061
5	Medan Area	48.897	50.095	98.992
6	Medan Kota	36.769	37.670	74.439
7	Medan Maimun	20.086	20.577	40.663
8	Medan Polonia	27.636	28.313	55.949
9	Medan Baru	20.025	20.515	40.540
10	Medan Selayang	52.433	53.717	106.150
11	Medan Sunggal	57.192	58.593	115.785
12	Medan Helvetia	74.448	76.273	150.721
13	Medan Petisah	31.303	32.071	63.374
14	Medan Barat	35.902	36.781	72.682
15	Medan Timur	55.036	56.384	111.420
16	Medan Perjuangan	47.361	48.521	95.882
17	Medan Tembung	67.759	69.419	137.178

⁴²Sumber :BPS Kota Medan, Data Penduduk Desember 2015

18	Medan Deli	89.632	91.828	181.460
19	Medan Labuhan	58.025	59.447	117.472
20	Medan Marelan	80.152	82.115	162.267
21	Medan Belawan	48.463	49.650	98.113
	Kota Medan	1.091.937	1.118.687	2.210.624

2.2 Perangkat Daerah Kota Medan

Di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Walikota dibantu oleh perangkat pemerintahan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perangkat daerah terdiri dari, sekretaris daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Peraturan daerah Kota Medan No. 3 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, perangkat daerah Kota Medan terdiri atas sekreariat daerah dan sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan dan Rumah Sakit Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Berikut adalah perangkat daerah Kota Medan:

- 1) Dinas Komunikasi dan Informasi
- 2) Dinas Perhubungan
- 3) Dinas koperasi dan UMKM
- 4) Dinas kebudayaan dan pariwisata

- 5) Dinas pendidikan
- 6) Dinas perindustrian perdagangan
- 7) Dinas bina marga
- 8) Dinas kesehatan
- 9) Dinas pertanian dan kelautan
- 10) Dinas perumahan dan permukiman
- 11) Dinas tata ruang dan tata bangunan
- 12) Dinas kependudukan dan catatan sipil
- 13) Dinas sosial dan tenaga kerja
- 14) Dinas kebersihan
- 15) Dinas pendapatan daerah
- 16) Inspektorat Kota Medan
- 17) Badan pemberdayaan masyarakat
- 18) Badan penanaman modal
- 19) Badan pengelola keuangan daerah
- 20) Badan penanggulangan bencana daerah
- 21) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- 22) Badan pegawai daerah
- 23) Badan perizinan pelayanan terpadu
- 24) Badan penelitian dan pengembangan
- 25) Badan ketahanan pangan
- 26) Kantor diklat

- 27) Bagian asset
- 28) Rumah Sakit Pirngadi
- 29) Perpustakaan Kota Medan
- 30) Kecamatan

2.3 Sejarah Singkat Lembaga dan Profil Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Medan

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Medan (BPPKB Kota Medan) dibentuk atas dasar hukum Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat dan Peraturan Daerah Kota Medan nomor : 3 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

Gambar 2.2 Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Medan Sumber : Dokumentasi Penelitian, 16 Januari

2017



2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Medan merupakan unsur pendukung dari tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a) Perumusan Kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.3 Struktur Organisasi

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Medan dipimpin oleh Kepala Badan dengan membawahi:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan lingkup sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program membawahi:

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Penyusunan Program

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- Penyusun rencana, program dan kegiatan kesekretariatan
- Pengkoordinasian penyusun perencanaan program Badan

- Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan Badan.
- Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Badan
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesekretariatan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan lingkup pengarusutamaan gender, kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan. Dan Membawahi:

1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender
2. Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Dalam melaksanakan tugas pokok, Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusun rencana, program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan

- Pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender
- Penyiapan kelembagaan pengarusutamaan gender
- Pelaksanaan pengarusutamaan gender
- Penyiapan kebijakan kualitas hidup perempuan
- Pengintegrasian kebijakan kualitas hidup perempuan
- Pengorganisasian pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan
- Penyiapan kebijakan perlindungan perempuan
- Pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan
- Pengorganisasian pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
- Penyiapan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak
- Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan
- Pengorganisasian pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak
- Penguatan kelembagana dan organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
- Pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
- Penyiapan data terpilih menurut jenis kelamin dari setiap bidang terkait
- Penyiapan data dan informasi dan edukasi (KIE)
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang pemberdayaan perempuan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan lingkup pengembangan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi membawahi:

1. Sub Bidang Pengembangan Pelayanan Keluarga Berencana
2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- Penetapan kebijakan dan pelaksanaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
- Penetapan kebijakan dan pelaksanaan kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan lingkup pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga membawahi:

1. Sub Bidang Ketahanan Keluarga
2. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
- Penyiapan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
- Penyiapan kebijakan dan pelaksanaan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Data dan Informasi

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Informasi. Bidang Data dan Informasi membawahi:

1. Sub Bidang Data
2. Sub Bidang Informasi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Data dan Informasi
- Penyiapan kebijakan dan pelaksanaan data mikro kependudukan dan keluarga
- Penyiapan kebijakan dan pelaksanaan advokasi dan KIE
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Bidang Bidang Data dan Informasi
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan
- Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior
- Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan ketentuan dan beban kerja
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur didalam peraturan perundang-undangan

2.3.4 Susunan Kepegawaian

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Medan (BPPKB Kota Medan) didalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh 189 aparatur pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2.3 Susunan Kepegawaian berdasarkan Jabatan/Eselon⁴³

No	Jabatan/Eselon	Jumlah
1	Kepala Badan/Eselon II	1 Orang

⁴³Berdasarkan Data Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan Tahun 2011-2015

2	Kepala Bidang/Sekretaris/Eselon III	4 Orang
3	Kepala Subbid, Subbag/ Eselon IV	11 Orang
4	Jabatan Fungsional/Non Jabatan/Staff	115/58 Orang

Tabel 2.4 Susunan Kepegawaian berdasarkan golongan kepangkatan⁴⁴

No	Golongan Kepangkatan	Jumlah
1	Golongan IV	16 Orang
2	Golongan III	158 Orang
3	Golongan II	15 Orang

2.4 Visi Misi

2.4.1 Visi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Medan (BPPKB Kota Medan)

Visi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Medan (BPPKB Kota Medan). Dengan berpedoman pada Vsi RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 dan melihat Tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2011-2015, maka Visi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Medan (BPPKB Kota Medan) sebagai berikut:

⁴⁴*Ibid*

“ Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Serta Dua Anak Lebih Baik Menuju Keluarga Sejahtera”

Kesetaraan gender bermakna setara dan seimbang dan sederajat dalam hubungan peran, kedudukan, fungsi hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Berarti Sederajat dalam perbedaan dan keikutsertaan diseluruh bidang kehidupan public.

Perlindungan Anak bermakna, terlaksananya hak-hak anak

Serta Dua Anak Lebih Baik bermakna, kelahiran anak yang direncanakan akan lebih baik

Menuju Keluarga Sejahtera bermakna Keluarga dan Rumah Tangga yang harmonis, terpenuhi dan terfasilitasi seluruh Kebutuhan Dasar. Keluarga yang terencana, kebutuhan pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, lingkungan perumahan, kehidupan keagamaan serta peningkatan pendapatan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari yang layak dan sejahtera.

2.4.2 Misi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Medan (BPPKB Kota Medan)

Misi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Medan (BPPKB Kota Medan) Tahun 2011-2015 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

- 2) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana
- 3) Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Kesejahteraan Keluarga⁴⁵

2.4.3 Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan

Kepala Badan	: Muslim, S.Sos, MSP (NIP. 19640706 198503 1 004, IV/b)
Sekretaris	: Ir. Hj Asrah FM. Harahap, MM (NIP. 19640213 199703 2 001, IV/b)
Kasubbag Umum	: Asimah,SE (NIP. 19651014 199303 2 003, IV/a)
Kasubbag Keuangan	: Siti Halina,SE (NIP. 19610202 199203 2 002, III/d)
Kasubbag Penyusunan Program	: Syafrina, SE (NIP. 19620510 199103 2 004, III/d)
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	: Dra. Yuslinar (NIP. 19641109 199303 2 002,IV/a)
Kasubbid Pengarusuteraan Gender	: Eli Ratna Sinulingga,SE

⁴⁵ Data Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Medan

(NIP. 19620323 1987 2 003,III/d)

Plt Kualitas Hidup Perempuan dan Anak : Dra. Faridawati Nasution

(NIP. 19630924 199203 2 005,IV/a)

Kepala Bidang KB Dan Kesehatan Produksi :-

Kasubbid Pengembangan : Dewi Murni Nst

Pelayanan KB (NIP. 19691219 199103 2 004,IV/a)

Kasubbid Kesehatan Produksi :-

Kepala bidang ketahanan dan : Drs. Azhar

pemberdayaaan keluarga (NIP. 19611014 198803 1 004,IV/b)

Kasubbid Pengembangan : Dra. Isma Navida Situmorang

Ketahanan Keluarga (NIP. 19610916 198603 2 004,III/d)

Kasubbid Pemberdayaan Keluarga : Rosmawarni, SE

(NIP. 19610916 198603 2 0004,III/d)

Kepala bidang Data dan Informasi :

Plt Kasubbid Data : Dra. Hermiati

(NIP. 19621017 199202 2 002,IV/a)

Kasubbid Informasi

: Ir. Tina Sabrina Lubis

(NIP. 1963111 199203 2 0005,IV/a)

2.5 Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Kota Medan

2.5.1 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Dalam rangka implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Maka untuk itu tingkat Kota Medan perlu mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu Walikota Kota Medan mengeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender.

2.5.1.1 Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender

- Membantu SKPD dalam ruang lingkup tugas pokok dan langkah konkrit sebagai solusi apabila melihat ada kesenjangan gender.
- Mendorong dan membantu SKPD untuk menelaah dan memperbaiki kebijakan, program, kegiatan dan anggaran agar lebih berspektif gender.
- Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan sensitif gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi, baik pemerintah maupun non pemerintah.

- Mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap didalam proses pembangunan kota yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- Menjabarkan dan mengambil inisiatif tindak lanjut kebijakan, program dan kegiatan responsif gender yang terdapat dalam Rencana Kerja SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Ikut serta dalam berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja dan atau kelompok nasional Pengarusutamaan Gender.
- Membuat laporan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan secara periodik kepada kelompok kerja.

2.5.1.2 Fungsi Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender

- Sebagai salah satu sumber data dan informasi tentang konsep gender, Pengarusutamaan Gender, kesetaraan dan keadilan gender serta program pembangunan kota yang berspektif gender.
- Sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring terbentuknya jejaring pengarusutamaan Gender dilingkungan kerjanya.
- Sebagai penggerak atau pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota yang responsif gender.

2.5.1.3 Program Pengarusutamaan Gender

- a) Sosialisasi Pengarusutamaan Gender kepada Dinas-dinas Kota Medan dan masyarakat Kota Medan
- b) Evaluasi Pengarusutamaan Gender
- c) Memberikan Keterampilan kepada Perempuan dan Perempuan Lansia
- d) Mengadakan Kegiatan Senam Pagi

2.5.1.4 Pedoman Ruang Lingkup Dan Isu Gender Rencana Aksi

Daerah Pengarusutamaan Gender.

- a) Urusan Pendidikan
 - 1. Menyusun data terpilah dibidang pendidikan khususnya yang menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Buta Aksara, Angka Putus Sekolah, guru dan Kepala Sekolah.
 - 2. Mengidentifikasi, menemukenali dan menganalisis masalah gender terkait APS, APK, dan APM.
 - 3. Menganalisis perbedaan angka partisipasi perempuan dan laki-laki pada berbagai indikator pendidikan pokok.
 - 4. Merumuskan Kebijakan, program dan rencana aksi efektif yang mendorong penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang responsive gender.
- b. Urusan Kesehatan

1. Menyusun data terpilah bidang kesehatan tentang Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
2. Memastikan tentang Standar Operasional Persiapan dan Pelaksanaan Operasi dirumah sakit yang tidak mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan dan antara suami dan istri.
3. Merumuskan kebijakan, program dan rencana aksi efektif yang mendorong pembangunan kesehatan yang mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

c. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

1. Mengkampanyekan, mensosialisasikan persamaan kedudukan, fungsi dan peranan perempuan dalam pembangunan kota.
2. Menyusun data dan informasi terpilah statistik sosial ekonomi dan politik berdasarkan jenis kelamin.
3. Mengkampanyekan dan mendosialisasikan kepersertaan pemakaian alat kontrasepsi KB secara setara antara laki-laki dan perempuan.

2.6.1 Keputusan Walikota Medan nomor 436/1084.K tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Medan Tahun 2012. Dalam rangka upaya peningkatan peran dan kualitas perempuan serta perlindungan anak dari tindakan-tindakan yang merugikan dan mengancam keberlangsungan hidup perempuan dan anak, perlu dibentuk dan dikembangkan

suatu bentuk partisipasi masyarakat dan kerjasama antar masyarakat, perempuan dan dunia usaha.

2.6.1.1 Tugas-Tugas Pokok Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Medan:

- Mengkoordinir dan memantau pengurus P2TP2A dalam segala kegiatan program layanan yang dilakukan.
- Mengkoordinir seluruh rangkaian kegiatan program layanan baik secara teknis maupun administrasi.
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas koordinator umum.
- Melaksanakan fungsi administrasi dan keuangan.
- Melaksanakan tindakan dan rujukan medis terhadap korban kekerasan, baik fisik, psikis melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat krisis terpadu lainnya.
- Memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan mulai dari pemeriksaan di kepolisian hingga tingkat pengadilan.
- Memberikan pendampingan dan asuhan pada korban serta pengamanan selama korban berada di P2TP2A.
- Melakukan advokasi dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Kepengurusan P2TP2A diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

- Dalam melaksanakan tugasnya, Kepengurusan P2TP2A wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan instansi/organisasi lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.